

**EFEKTIVITAS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DALAM KOORDINASI
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH(LPPD)
DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MUHAMMAD RIZKY DWIPUTRA PANGGATO
NPP. 29.1465

*Asdaf Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: 29.1465@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem (GAP): the author focuses on the problem of the General Governance section of the Banggai Regency regional secretariat which still uses the old method, namely by submitting printed results such as print outs or more specifically in the form of a copy that can be seen or a copy that can be held (hard copy) and also in the preparation of the LPPD. **Purpose:** This study aims to determine and describe how the effectiveness of the governance section in coordinating the preparation of the regional government administration report (LPPD) in the Banggai Regency, Sulawesi Province is in the middle of preparing the LPPD, how the efforts made by the governance section in realizing the effectiveness of the governance section in coordinating the preparation of reports Local Government Administration (LPPD) in Banggai Regency, Sulawesi Province is currently preparing the LPPD. **Methods:** This research is a qualitative descriptive based on interviews, observation and documentation, data processing with data reduction and presentation and conclusions. **Results/Findings:** The results in this study are that the coordination in the preparation of the LPPD between the Governance Section and the Regional Apparatus has been running effectively. As for the efforts to realize the Effectiveness of the Governance Section in Coordination of the Preparation of Local Government Administration Reports (LPPD) in Banggai Regency, Central Sulawesi Province, the preparation of the LPPD by holding workshops and always coordinating with related OPDs. **Conclusion:** Coordination in the preparation of the LPPD has been running effectively, this can be seen from the well implemented dimensions of input, process, results and productivity while the efforts made by the regional secretarial administration department to realize the Effectiveness of the Governance Section in Coordination in the Preparation of Regional Government Implementation Reports (LPPD) In Banggai Regency, Central Sulawesi Province, it is coordination and transparency in the context of creating a local government administration report (LPPD) which is the measure of the Banggai Regency government in the implementation of regional government.

Keywords: Effectiveness, Coordination, Local Government Implementation Report.

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): penulis berfokus pada permasalahan bagian Tata Pemerintahan umum sekretariat daerah Kabupaten Banggai yang masih menggunakan cara lama yaitu dengan menyerahkan hasil yang dicetak seperti print out atau lebih jelasnya berupa salinan yang dapat dilihat atau salinan yang dapat di pegang (hard copy) dan juga dalam penyusunan LPPD. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas bagian tata pemerintahan dalam koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) di kabupaten banggai provinsi sulawesi tengah penyusunan lppd, bagaimana upaya yang dilakukan bagian tata pemerintahan dalam mewujudkan efektivitas bagian tata pemerintahan dalam koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (lppd) di kabupaten banggai provinsi sulawesi tengah penyusunan lppd. **Metode:** Penelitian adalah deskriptif kualitatif berbasis wawancara, observasi dan dokumentasi, pengolahan data dengan reduksi dan penyajian data serta kesimpulan. **Hasil/Temuan** Hasil dalam penelitian ini ialah koordinasi dalam penyusunan LPPD antara Bagian Tata Pemerintahan dengan Perangkat Daerah sudah berjalan dengan efektif. Adapun upaya untuk mewujudkan Efektivitas Bagian Tata Pemerintahan Dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah penyusunan LPPD dengan mengadakan workshop serta selalu berkoordinasi dengan OPD terkait. **Kesimpulan:** Koordinasi dalam penyusunan LPPD sudah berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari terlaksana dengan baiknya dimensi input, proses, hasil dan produktivitas sedangkan upaya yang dilakukan oleh bagian tata usaha pemerintahan sekretarian daerah untuk mewujudkan Efektivitas Bagian Tata Pemerintahan Dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah adalah koordinasi dan transparansi dalam rangka terciptanya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang menjadi ukuran pemerintah Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Kata Kunci: Efektivitas, Koordinasi, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah diharuskan untuk menyerahkan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKJP), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Pasal 70 (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) akan disampaikan dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun anggaran dan akan digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembinaan.

Setelah dievaluasi jika ada Kepala Daerah yang tidak memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) maka ditindak secara administratif dengan teguran tertulis Menteri kepada Gubernur dan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Walikota. Saat teguran tertulis sudah disampaikan dua kali beruntun dan tidak dilaksanakan, walikota/Bupati diharuskan mengikuti program pembinaan khusus eksplorasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian. Yang menjalankan pemerintahan ialah wakil walikota/bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Sebagaimana untuk menjalankan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam PP ini mengatur mengenai beberapa definisi yang digunakan dalam pelaksanaan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKJP), Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD), dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Demi menjalankan kewajiban hukum tersebut, pada akhir tahun anggaran harus menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang menjelaskan kemajuan pengaktualan pembangunan serta memuat capaian kinerja penyelenggaraan daerah dan tugas pembantuan. LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan di gunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi fasilitas penting buat merekatkan ikatan hirarkis antara pusat serta daerah , sehingga aktivitas Pemerintahan daerah senantiasa jadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan pusat secara umum . Oleh sebab itu pengaturan tentang pelaporan bukan hanya untuk penyelenggaraan desentralisasi ,tetapi mengendalikan laporan dalam rangka dekonsentrasi serta tugas pembantuan ,yang bertujuan untuk mengenali perkembangannya serta selaku analisis agar dijadikan bahan pembinaan serta pengendalian pengurusan pemerintahan di daerah. Pada penyusunan dan pengumpulan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) meliputi ketepatan waktu dan kesesuaian data yang diperlukan juga mempengaruhi penyusunan dan pengumpulan data LPPD baik pada Bagian Tata Pemerintahan umum maupun pada Perangkat Daerah (OPD), oleh karena itu kinerja pegawai dituntut mempunyai keahlian dan kemampuan sehingga mampu menyelesaikan tugas dan tanggungjawab tepat waktu serta tepat pada sasaran tugas yang diberikan.

Bagian Tata Pemerintahan selanjutnya memberikan batas waktu pengumpulan data yang diperlukan kepada Perangkat Daerah yang menjadi acuan OPD dalam tenggat waktu pengumpulan. Namun, sering terjadinya keterlambatan pengumpulan data oleh OPD. Keterlambatan dalam pengumpulan data tersebutlah yang menghambat Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan data LPPD. Mengingat pentingnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah , pemahaman OPD terkait pentingnya data LPPD sangat diharapkan oleh bagian tata pemerintahan sehingga tidak terjadinya keterlambatan dan anggapan sebelah mata tentang pentingnya LPPD.

Berdasarkan kondisi di atas maka penulis tertarik membahas permasalahan ini sebagai bahan penelitian untuk proposal skripsi. Adapun judul yang dipilih yaitu **“EFEKTIVITAS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DALAM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN**

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH”

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dalam pra-penelitian bersama Kepala Bagian Tata Pemerintahan Proses penyusunan dan pengumpulan Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) di kabupaten Banggai, Bagian Tata Pemerintahan umum sekertariat daerah Kabupaten Banggai masih menggunakan cara lama yaitu dengan menyerahkan hasil yang dicetak seperti print out atau lebih jelasnya berupa salinan yang dapat dilihat atau salinan yang dapat di pegang (hard copy) dan juga dalam penyusunan LPPD Bagian Tata Pemerintahan umum mulai dari permintaan data, pengumpulan data, dan pengolahan data, menunggu data dari OPD terkait untuk di kumpulkan di Bagian Tata Pemerintahan umum yang selanjutnya akan diolah penyusunanya, dengan belum adanya inovasi dari Bagian Tata Pemerintahan umum yang memudahkan OPD dalam pengumpulan data yang diperlukan oleh Bagian Tata Pemerintahan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian yang berjudul Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro oleh Elip Helda, Malik Malik, Ade Thiya Delisa ini pada 2020 ini memiliki fokus penelitian pada hambatan-hambatan dalam penyusunan LPPD tahun terakhir Kota Metro mampu mendapatkan kategori terbaik I (2018) dan terbaik II (2017) dari Kementerian Dalam Negeri dan walaupun dihadapi dengan hambatan yang terjadi yaitu pada faktor struktur birokrasi dan faktor disposisi. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu LPPD. Letak perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus penelitian yang dilakukan. penelitian sebelumnya fokus penelitian terletak pada hambatan-hambatan yang terjadi selama penyusunan LPPD yang dilihat dari teori Implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dalam Budi Winarno (2007) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu melihat bagaimana efektivitas koordinasi dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009:60) meliputi Input, Proses, Hasil, dan Produktivitas.

Kedua, Penelitian yang berjudul Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan oleh Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokot, Fitri H Mamonto pada 2020 ini memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana proses LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa serta hambatan yang ditemui dalam penyusunannya. Permasalahan yang terjadi yaitu kurang tersedianya data sesuai format, kurangnya komitmen dan motivasi pegawai, kompetensi SDM, kurangnya koordinasi dan komunikasi, serta penilaian atas hasil kinerja. pada penelitian ini fokus penelitian adalah melihat bagaimana efektivitas penyusunan LPPD yang dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985: 53) meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Kemudian perbedaan pada lokus dan tahun penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada Sekretariat Dearah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2020 sedangkan penelitian ini dilakukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informasi yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Penulis.

1.5 Tujuan.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Efektivitas Koordinasi Dalam Penyusunan Dan Pengumpulan Data LPPD Pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai.
2. Untuk Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala Pengumpulan dan penyusunan data LPPD pada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2013) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam

penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Simangunsong (2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. EFEKTIVITAS BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DALAM KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada penelitian ini penulis memfokuskan dengan dimensi dan indikator yang mengacu pada teori Efektivitas menurut Sedarmayanti (2009) dimana indikator pengukuran efektivitas meliputi input, proses, hasil dan produktivitas.

A. INPUT

- Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil Input memiliki dua sub indikator yaitu data LPPD. Data Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banggai merupakan data yang diterima dari Perangkat Daerah kemudian data yang diterima divalidasi oleh Bagian Tata Pemerintahan agar tidak terdapat kekurangan /kesalahan dalam pengumpulan data dari Perangkat Daerah yang selanjutnya akan diolah menjadi Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah .
- Dimensi input pada indikator data LPPD terdapatnya kesalahan dan kekurangan data yang dimasukkan oleh OPD dan terlambatnya OPD dalam pengumpulan data LPPD

B. PROSES

- Proses Efektivitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. Indikator proses mempunyai empat sub indikator yaitu : 1. sumber daya manusia 2. sarana dan prasarana 3. koordinasi 4. pengawasan.

- Penyusunan LPPD tentunya memiliki suatu tim dalam hal ini disebut tim penyusunan. Kualitas dan kuantitas yang dimiliki oleh tim penyusun tentunya memiliki pengaruh terhadap kualitas LPPD yang disusun. Kualitas dan kuantitas tim penyusun juga mempunyai andil dalam berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan. dimensi proses pada indikator sumber daya manusia dapat disimpulkan berjalan dengan efektif dikarenakan perencanaan menerima data yang diberikan oleh beberapa bidang yang ada di dinas Pemerintahan Desa dan di kelolah lalu dikumpulkan ke Bagian Tata Pemerintahan.
- Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan. Dengan demikian, suatu proses kegiatan yang akan dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, jika sarana dan prasarana (sarpras) tidak tersedia. Fungsi utama sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki tujuan : Menciptakan kenyamanan, Menciptakan kepuasan, Mempercepat proses kerja, Memudahkan proses kerja, Meningkatkan produktivitas dan Hasil lebih berkualitas. r sarana dan prasarana yang ada di DPMPTSP sudah lengkap dalam menunjang sub bagian Perencanaan dan program mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
- koordinasi adalah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara efisien dan efektif. Secara etimologis, koordinasi adalah kegiatan menertibkan, mengatur atau menciptakan seluruh hal berjalan dengan lancar secara bersama-sama. sub bagian perencanaan dan program dinas kesehatan telah menindaklanjuti surat yang dikirim oleh Bagian Tata Pemerintahan kemudian langsung melakukan permintaan data kelengkapan kepada bidang-bidang yang ada di dinas kesehatan, namun bidang tersebut dalam pengumpulan data yang diminta oleh sub bagian perencanaan dan program terjadi keterlambatan dan kurangnya perhatian terkait permintaan data oleh sub bagian perencanaan dan program dinas kesehatan, hal tersebut lah yang menjadi kendala dinas kesehatan dalam pengumpulan data kepada Bagian Tata Pemerintahan.
- Istilah pengawasan di tengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki tingkat penafsiran, dimulai dari penafsiran yang sangat kompleks dan rumit, baik yang berkaitan dengan pola

pemikiran maupun pola aktivitas yang harus dilakukan. Penafsiran pengawasan yang sederhana biasanya dilakukan oleh seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri atau mengawasi keluarganya sendiri, sedangkan penafsiran pengawasan yang sifatnya kompleks dan rumit biasanya pengawasan yang terdapat dalam organisasi yang besar, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh perusahaan yang besar, dan lain sebagainya. Pengawasan yang dilakukan selama proses penyusunan LPPD yaitu dengan memantau dan mengawasi proses penyusunan LPPD dari jajaran tim penyusun, OPD dan ke tata pemerintah. Bagian Tata Pemerintahan juga turun langsung kepada Perangkat Daerah yang belum memasukkan data ke Bagian Tata Pemerintahan

C. HASIL

- Hasil Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau organisasi. hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan sebagainya. Indikator hasil memiliki dua sub indikator yaitu: 1. kualitas data 2. evaluasi.
- Data quality atau kualitas data mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Tujuannya adalah memastikan agar data sesuai untuk melayani kebutuhan spesifik tata pemerintahan dalam konteks tertentu. Data yang dinilai sesuai untuk tujuan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai data berkualitas tinggi. Penyusunan LPPD tim penyusun mengedepankan transparansi, akuntabel, akurasi, dan obyektivitas serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi.
- Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, 'evaluation' yang memiliki berarti penilaian atau penaksiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, evaluasi juga mempunyai arti yang sama, yakni penilaian. Jadi, adanya kegiatan evaluasi tersebut tentu bukan tanpa sebab. Maka itu, penting mengetahui dan memahami tujuan evaluasi, fungsi hingga tahapannya. evaluasi LPPD yang dihasilkan oleh Bagian Tata Pemerintahan sudah baik dan sesuai pedoman yang ada. Evaluasi hasil penyusunan LPPD dilakukan

dengan cara menghitung dan menilai indeks komposit terhadap dua variabel utama yaitu indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi.

D. PRODUKTIVITAS

- Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada keluaran atau hasil. Dimensi Produktifitas memiliki indikator yaitu : 1. motivasi 2. Pendidikan
- Secara bahasa, motivasi berasal dari akar kata bahasa Latin yaitu “*movore*”, yang artinya adalah gerak atau dorongan untuk bergerak. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, motivasi dikenal dengan sebutan “*motive*” yang artinya daya gerak atau alasan. Apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, asal kata motivasi adalah “*motif*”, yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Motif menjadi dasar dari kata motivasi yang bisa diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif. Maka dari itu, dengan kata lain pengertian motivasi adalah segala sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan. sebagai pimpinan Kepala Bagian Tata Pemerintahan memberikan motivasi seperti mendengarkan apa keluhan bawahan dan dapat menghargai ide dan pendapat dari bawahan. Serta mendengarkan masalah yang dihadapi dalam pengumpulan dan penyusunan LPPD serta memberikan saran dan kebijakan.
- Dengan perkembangan zaman di dunia pendidikan yang terus berubah dengan signifikan sehingga banyak merubah pola pikir pendidik, dari pola pikir yang awam dan kaku menjadi lebih modern. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Menyikapi hal tersebut pakar-pakar pendidikan mengkritisi dengan cara mengungkapkan dan teori pendidikan yang sebenarnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. motivasi yang diberikan pimpinan kepada tim penyusun LPPD berbentuk saling menghargai dan saling mengapresiasi kerja tim. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh tim penyusun LPPD sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing.. Bagian Tata Pemerintahan Juga mengadakan Workshop Penyusunan LPPD dengan narasumber Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaruan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian Penelitian yang berjudul Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Metro oleh Elip Helda, Malik Malik, Ade Thiya Delisa ini pada 2020. Penelitian sebelumnya fokus penelitian terletak pada hambatan-hambatan yang terjadi selama penyusunan LPPD yang dilihat dari teori Implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) dalam Budi Winarno (2007) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu melihat bagaimana efektivitas koordinasi dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009:60) meliputi Input, Proses, Hasil, dan Produktivitas.

Kemudian, perbedaan penting yang menunjukkan temuan utama penulis yang mencerminkan kebaruan penelitian penulis dengan penelitian yang berjudul Implementasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pada Sekretariat Daerah Minahasa Selatan oleh Henry Nelson Momuat, Jetty EH Mokot, Fitri H Mamonto pada 2020 ini memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana proses LPPD di Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa serta hambatan yang ditemui dalam penyusunannya. Sementara untuk penelitian penulis lebih berfokus pada koordinasi yang dilakukan dalam penyusunan LPPD.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah pada hasil jangka panjang. Dimana Data quality atau kualitas data mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas pada data. Tujuannya adalah memastikan agar data sesuai untuk melayani kebutuhan spesifik tata pemerintahan dalam konteks tertentu. Data yang dinilai sesuai untuk tujuan yang dimaksud dapat dikatakan sebagai data berkualitas tinggi. Penyusunan LPPD tim penyusun mengedepankan transparansi, akuntabel, akurasi, dan obyektivitas serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi.

IV. KESIMPULAN

- 1 Koordinasi dalam penyusunan LPPD sudah berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari terlaksana dengan baiknya dimensi input, proses, hasil dan produktivitas.
- 2 Upaya yang dilakukan oleh bagian tata usaha pemerintahan sekretarian daerah untuk mewujudkan Efektivitas Bagian Tata Pemerintahan Dalam Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah adalah koordinasi dan transparansi dalam rangka terciptanya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) yang menjadi ukuran pemerintah Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita. (2011). Manajemen Pemerintahan Daerah. Graha Ilmu.

Elip, H., Malik, M., & Delisa, A. T. (2020). Implementasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lppd) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Metro. Volume 6 N.

Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.

Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Pembaharuan. Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Dikutip dari Sutisna, 1989), (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 439

Mahmudi, M. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. YKPN.

Mangkunegara. (2011). Manajemen Sumber Daya Perusahaan. PT. Remaja Rosda Karya.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Andi.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi Penelitian Sosial.

Sedarmayanti. (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. CV. Mandar Maju.

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. ALFABETA.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. ALFABETA.

